

Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial melalui Subsidi Listrik 450 VA di Kota Ternate

Mohbir Umasugi

Universitas Terbuka, Tangerang, Email: mohbir@ecampus.ut.ac.id

Received: June 11, 2023; In Revised: July 29, 2023; Accepted: August 29, 2023

Abstrak

Penyelesaian kemiskinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan penyelesaian di daerah lainnya. Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Untuk itu, program JPS harus mampu menyelesaikan akar dari masalah kemiskinan yang berhasil diidentifikasi. Proses selanjutnya adalah identifikasi alokasi. Kegiatan ini dilakukan ketika mengirim bantuan JPS ke penerima bantuan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat dari program jaring pengaman sosial melalui subsidi listrik 450 VA untuk 8 kecamatan di Kota Ternate dengan uraian Kecamatan Ternate Selatan terdapat 655 keluarga yang tersebar di 17 kelurahan, Kecamatan Ternate Tengah terdapat 574 keluarga yang tersebar di 16 kelurahan, Kecamatan Ternate Utara terdapat 808 keluarga yang tersebar di 14 kelurahan, Kecamatan Ternate Barat terdapat 589 keluarga yang tersebar di 7 kelurahan, Kecamatan Pulau Ternate terdapat 409 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan, Kecamatan Pulau Hiri terdapat 390 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan, dan Kecamatan Pulau Moti terdapat 588 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan. Sedangkan untuk kecamatan Pulau Batang Dua ada 6 kelurahan namun tidak ada penerima karena di kecamatan tersebut semua pelanggan PLN memakai daya listrik 900 VA dan di atasnya. Total keseluruhan ada 4013 keluarga penerima manfaat yang terdapat di 7 kecamatan yang ada untuk Kota Ternate.

Kata Kunci: Implementasi, Subsidi, Listrik, Kota Ternate.

Abstract

The solution of poverty in one region is certainly different from the solution in other regions. The causes of poverty can be seen from internal and external factors. For this reason, the Social Safety Net (JPS) program must be able to solve the roots of the identified poverty problems. The next process is the identification of allocations. This activity is carried out when sending JPS assistance to beneficiaries. The data analysis method used in this study is qualitative descriptive. Descriptive qualitative is a method used to explore findings in the field. The results showed that the beneficiaries of the social safety net program through electricity subsidies of 450 VA for 8 sub-districts in Ternate City with the description of South Ternate District there were 655 families spread across 17 kelurahan, Central Ternate District there were 574 families spread across 16 kelurahan, North Ternate District there were 808 families spread across 14 kelurahan, West Ternate District has 589 families spread across 7 villages, Ternate Island District has 409 families spread across 6 villages, Hiri Island District has 390 families spread across 6 villages, and Moti Island District has 588 families spread across 6 kelurahan. As for the sub-district of Pulau Batang Dua there are 6 sub-districts but there are no recipients because in that sub-district all PLN customers use electricity of 900 VA and above. In total there are 4013 beneficiary families located in 7 sub-districts that exist for Ternate City.

Keywords: Implementation, Subsidies, Electricity, Ternate City.

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia, khususnya bidang ekonomi, sebelum terjadinya krisis telah mencatat sejumlah kemajuan, walaupun di sana sini masih ditemui sejumlah masalah pembangunan yang perlu segera ditangani dan dipecahkan (Nasrah et al., 2021; Putra & Anzaikhan, 2022). Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi masalah fundamental yang bersifat kronis, yaitu masalah yang berkaitan dengan kesenjangan antar pelaku ekonomi /antar manusia, kesenjangan antar daerah dan kesenjangan antar sektor kegiatan ekonomi. Masalah kesenjangan ini berakibat luas pada masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan sosial seperti tingkat pendidikan dan kesehatan (Fanni et al., 2022; Timmerman et al., 2021). Dalam aspek makro, masalah kesenjangan merupakan implikasi dari kurangnya perhatian pencapaian tujuan pembangunan untuk rakyat mewujudkan “juriteradil”

(Sumodiningrat, 1998; Hajad et al., 2021). Negara-negara yang terkena dampak krisis ekonomi atau bencana alam menghadapi kenyataan yang agak pahit, yaitu tidak mungkin mengisolasi wilayahnya dari dampak negatif krisis ekonomi dan bencana alam terhadap negara lain.

Negara-negara yang menganut ideologi negara kesejahteraan, yakni yang telah memiliki program jaring pengaman sosial, tidak mengalami kesulitan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi dan bencana alam (Aldama et al., 2021; Wibawani et al., 2021). Upaya ini dapat dicapai melalui upaya koordinasi, pengalokasian, dan penyaluran dana jaring pengaman sosial secara langsung kepada kelompok sasaran di masyarakat terdampak. Jika tidak, dampaknya akan lebih buruk bagi individu atau keluarga sebagai kelompok sasaran (*vulnerable group*) (Anggito Abimanyu et al., 1998). Permasalahan pembangunan lainnya yang juga mengejutkan adalah krisis moneter, ekonomi dan politik yang saat ini melanda negara Indonesia. Permasalahan kedua ini membuat keadaan perekonomian Indonesia sangat mengkhawatirkan. Inflasi yang tinggi, perkiraan pertumbuhan yang negatif, meningkatnya PHK dan pengangguran, meluasnya kemiskinan dan krisis pangan juga berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial Masyarakat (Ardi & Almaida, 2022; Setyawan et al., 2023).

Bank Dunia menyatakan bahwa program jaring pengaman sosial dimaksudkan untuk melindungi kelompok orang atau keluarga yang mengalami gangguan kronis yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan secara permanen (kemiskinan kronis) dan kelompok individu atau keluarga yang mengalami penurunan kapasitas. sesuai kemampuan mereka (Barany et al., 2020; Lisma & Kurniawan, 2022). Kebutuhan kelangsungan hidup (kekuatan transisi) kelompok masyarakat rentan terhadap krisis tersebut, sehingga diperlukan perlindungan sosial untuk meningkatkan produktivitas mereka dengan memberikan kesempatan kerja dan layanan sosial dasar. bantuan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Setiap individu dan keluarga yang mengalami krisis merupakan kelompok prioritas bagi mereka yang menerima dukungan program jaring pengaman sosial. Pengalaman Bank Dunia di beberapa negara yang terkena dampak krisis ekonomi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelompok masyarakat rentan terhadap krisis (*capacity building*), termasuk kelompok masyarakat miskin, dapat dicapai melalui upaya penjangkauan pemberdayaan masyarakat (Elizabeth, 2021; Basri et al., 2022). Tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui berbagai komponen program untuk menciptakan peluang bagi kelompok masyarakat rawan krisis untuk mengakses sumber daya produktif (Subbarao, et al., 1997).

Saat ini program-program JPS di Indonesia diprioritaskan pada: (i) peningkatan ketahanan pangan (*food security*) yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat; (ii) penciptaan lapangan kerja produktif (*labour intensif*) yang diarahkan untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan ekonomi melalui pola padat karya produktif; (iii) perlindungan sosial (*social protection*) diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat pada pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan; dan (iv) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small medium enterprise*) untuk pemberdayaan ekonomi rakyat produktif yang berjiwa koperatif melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan serta bantuan promosi dan kemitraan usaha. Keempat prioritas itu perlu menjadi landasan bagi upaya penanggulangan masalah kesenjangan. Kesenjangan antar sektor kegiatan ekonomi diatasi dengan program pembangunan sektoral, kesenjangan antar wilayah diatasi dengan program pembangunan daerah, dan kesenjangan antar masyarakat/kelompok diatasi melalui program pembangunan khusus.

Beberapa faktor menjadi penentu pertimbangan program JPS mempengaruhi kesuksesan dari pelaksanaan program JPS. Sebagai contoh penyelesaian kemiskinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan penyelesaian di daerah lainnya. Untuk itu, diperlukan adanya identifikasi terkait dengan siapa yang miskin dan mempelajari kehidupan bermasyarakat pada individu tersebut. Setelah identifikasi siapa yang miskin maka dilanjutkan kepada identifikasi "Mengapa mereka miskin?" Kondisi ini mengacu kepada sebab seseorang menjadi miskin. Penyebab kemiskinan

MINISTRATE

dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Untuk itu, program JPS harus mampu menyelesaikan akar dari masalah kemiskinan yang berhasil diidentifikasi. Proses selanjutnya adalah identifikasi alokasi. Kegiatan ini dilakukan ketika mengirim bantuan JPS ke penerima bantuan. Bagian ini berarti mempertimbangkan apakah membeli bantuan secara terpusat atau didesentralisasikan di setiap daerah.

Program JPS berupa dana yang dialokasikan langsung kepada masyarakat di tingkat desa/kecamatan harus dikelola dalam unit pengelolaan keuangan (KPH) yang dikelola oleh masyarakat sendiri. PUK berperan dalam mengelola berbagai dana dari pemerintah melalui mekanisme DIP (Daftar Proyek) dan SPABP (Surat Persetujuan Anggaran Bantuan Pembangunan) serta dana bergulir masyarakat. PUK dapat menjadi organisasi pengelola keuangan masyarakat yang berbadan hukum koperasi (berdasarkan UU Koperasi) atau berbadan hukum lain (berdasarkan Undang-Undang Perbankan). Lembaga keuangan komunitas ini selanjutnya disebut sebagai lembaga keuangan alternatif komunitas. Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok dari masyarakat kurang mampu (Muthiah, 2021; Nurullah, 2023). Selain bantuan sosial, pemerintah juga memberikan berbagai subsidi, termasuk subsidi listrik kepada masyarakat. Berbagai program bantuan sosial dan subsidi tersebut diberikan oleh pemerintah dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Namun berbeda dengan Bantuan Sosial, subsidi diberikan sebagian besar masih dalam bentuk subsidi barang sehingga terdapat potensi salah sasaran.

Program JPS harus dipahami sebagai stimulus untuk mendorong produktivitas dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Semoga model pembangunan ini dapat membantu mewujudkan pembangunan dengan tren populer antara lain: (i) menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih demokratis; (ii) pemberdayaan masyarakat terkait penguatan otonomi daerah dilaksanakan secara praktis dan dinamis; (iii) mengkonsolidasikan perubahan dalam struktur sosial itu sendiri dengan modernisasi lebih lanjut; dan (iv) semakin mengintegrasikan dan menghubungkan berbagai program antar masyarakat, antar wilayah, antar bidang kegiatan ekonomi, serta antara kegiatan makro dan mikro negara.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data digunakan dengan dua cara yaitu teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari Dinas Sosial Kota Ternate, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling dengan menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang Data dan Informasi serta staf Dinas Sosial Kota Ternate dan Keluarga Penerima Manfaat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi temuan di lapangan (Moleong, 2001:23).

Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama tiga puluh tahun Orde Baru akan terhindar dari berbagai permasalahan sosial ekonomi di masyarakat. Namun kelemahan struktural berupa kesenjangan infrastruktur, kelembagaan, tata kelola dan koordinasi pengelolaan sumber daya nasional telah memperlambat pemulihan dan mengatasi dampak krisis. Jaring pengaman sosial merupakan alat koordinasi dan integrasi antara program pembangunan khusus yang ditujukan untuk mengatasi situasi krisis (program darurat) dan program pembangunan

MINISTRATE

reguler yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kronis yang berkaitan dengan tantangan ekonomi mendasar berupa ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan (Elizabeth, 2022). Di sisi lain, persoalan pendanaan jaring pengaman sosial seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam situasi krisis dan terbatasnya pendanaan pemerintah seperti yang terjadi di Indonesia, pelaksanaan program jaminan sosial akan menghadapi banyak keterbatasan. Keadaan krisis menunjukkan bahwa ketimpangan kronis menjadi penyebab utama munculnya kelompok miskin.

Jaring Pengaman Sosial adalah strategi darurat yang paling memungkinkan dilakukan untuk mengatasi krisis sosial dan ekonomi pada masa pandemi. Hal itu karena krisis yang terjadi adalah dampak yang belum bisa terantisipasi sebelumnya. Artinya pandemi adalah bencana kesehatan yang dampaknya tidak bisa diprediksikan secara singkat dan pasti. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi jangka pendek adalah hal yang paling utama dilakukan. Jaring Pengaman Sosial yang dilakukan pemerintah atau inisiasi masyarakat itu sendiri memang menjadi jalan keluar yang mampu membantu kelompok rentan yang terkena imbas kebijakan physical distancing dan pembatasan sosial baik skala kecil maupun besar. Namun dapat diakui bahwa Jaring Pengaman Sosial memang perlu menjadi bahan refleksi. Jaring Pengaman Sosial yang dilakukan pemerintah dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) masih banyak yang belum tepat sasaran, mengingat akurasi data penerima bantuan sosial masih meragukan. Sebab tidak dipungkiri terjadi tumpang tindih antara data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pusat dan provinsi. Terlepas dari problem, Jaring Pengaman Sosial yang dilakukan pemerintah lebih sebatas sebagai pengaman sementara, belum sampai pada recovery sebab dampak dari krisis pandemi cukup kompleks dan berdampak jangka panjang.

Tabel 1. Bantuan Sosial Era Reformasi

Priode	Nama Bantuan	Metode Distribusi	Pola
Era Reformasi Hingga Saat Ini	Program Keluarga Harapan (PKH) 2007-2016	Bantuan tunai disalurkan oleh PT. Pos Indonesia	Penyaluran nonperbankan
	PKH mulai tahun 2016 menggunakan kartu	Bantuan nontunai menggunakan kartu dan melalui Bank Himbara	Penyaluran Perbankan
	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako	Bantuan nontunai menggunakan kartu dan melalui Bank Himbara	Penyaluran Perbankan
	Program Indonesia Pintar (PIP)	Bantuan nontunai menggunakan kartu, melalui Bank Himbara	Penyaluran Perbankan
	Subsidi listrik	Subsidi melalui PLN	Penyaluran nonperbankan
	Subsidi LPG 3 Kg	Subsidi harga melalui Pertamina (2016)	Penyaluran nonperbankan
	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Bantuan usaha kelompok bersifat nontunai melalui Bank Himbara	Penyaluran perbankan
	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB 2016)	Bantuan tunai langsung melalui PT. Pos Indonesia	Penyaluran nonperbankan
	ASPDB 2018	Bantuan nontunai melalui PT. Pos Indonesia	Penyaluran perbankan

MINISTRATE

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD 2019-1020)	Bantuan nontunai melalui rekening Bank Himbara	Penyaluran perbankan
ASLUT Tahun 2017-2019	Bantuan nontunai melalui rekening Bank Himbara	Penyaluran perbankan
Program Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (BANTU LU 2019 - 2020)	Bantuan nontunai melalui rekening Bank Himbara	Penyaluran perbankan

Sumber: Diolah Dari Data Dinas Sosial Kota Ternate

Tabel 1 diatas menggambarkan jenis program bantuan sosial di era reformasi sampai saat ini, bantuan sosial di mulai dengan Program Keluarga Harapan (PKH) 2007-2016, diawal mulainya program strategis sekaligus prioritas nasional, prohram PKH menggunakan metode tunai yang di salurkan oleh PT Pos Indonesia, kemudian pada tahun 2016 PKH di alihkan ke bantuan nontunai menggunakan kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang merupakan ATM khusus untuk penerima bantuan sosial, Kementerian Sosial menggunakan Bank HIMBARA untuk mendistribusikan bantuan non tunai ini ke 514 kab/kota se Indonesia. Ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako menggunakan mekanisme yang sama dengan PKH, selanjutnya program Indonesia pintar dengan metode distribusi kepada penerima manfaat menggunakan kartu melalui bank. Subsidi listrik di dapatkan dari PLN dan juga melalui jaring pengaman sosial dengan menggunakan postur anggaran pendapatan daerah, pada poin inilah pemerintah daerah Kota Ternate menterjemahkan dengan memberikan bantuan pembayaran listrik kepada 4013 keluarga yang menggunakan meteran 450 VA yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di wilayah administrasi Kota Ternate.

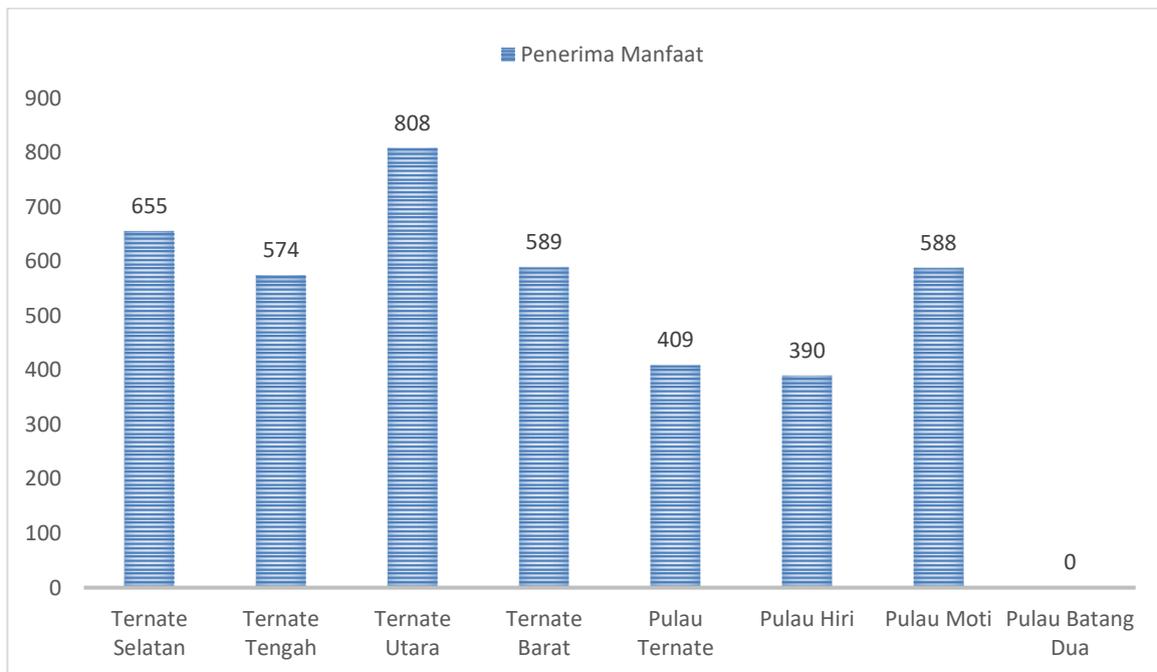
Selanjutnya ada program asistensi sosial penyandang disabilitas, bantuan atensi ini merupakan bantuan nontunai melalui rekening bank HIMBARA, kemudian ada bantuan ASLUT mekanisme distribusi juga menggunakan nontunai melalui rekening bank HIMBARA, dan program bantuan lanjut usia yang memakai mekanisme penyaluran nontunai melalui rekening HIMBARA. Mekanisme penyaluran bantuan sosial nontunai ini di pakai untuk menghindari potongan yang di lakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk setiap penerima bantuan pertama-tama akan di salurkan buku tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) sebutan lain dari ATM untuk penerima bantuan sosial, setelah buku tabungan di distribusi kepada keluarga penerima manfaat kemudian nominal bantuan akan di transfers langsung ke rekening-rekening keluarga penerima manfaat, tujuannya agar nominal bantuan sosial apapun nominalnya akan sampai ke penerima secara utuh atau tidak ada pemotongan dari pihak manapun. Dalam proses implementasi program bantuan sosial di kawal oleh pendamping yang di rekrut secara profesional oleh Kementerian Sosial yang kemudian di tugaskan untuk mengawal program strategis sekaligus prioritas nasional.

Konsep jaring pengaman sosial juga diperkenalkan oleh para ekonom kapitalis pada masa transisi perekonomian di negara-negara Eropa Timur pada tahun 1990. Pada saat itu sedang terjadi transisi perekonomian dari sistem ekonomi sosialis ke sistem ekonomi pasar. Transisi ekonomi ini mengakibatkan kelompok miskin yang dalam sistem ekonomi sosialis mendapat jatah pangan gratis dari pemerintah, tidak lagi mendapat jatah pangan gratis (Mubyarto, 1998). Prinsip pengelolaan program JPS mengikuti prinsip-prinsip berikut: (i) menyalurkan bantuan secara cepat dan langsung kepada kelompok masyarakat penerima manfaat; (ii) rencana aksi harus disebarluaskan secara mudah dan terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat; (iii) seluruh kegiatan harus bertanggung jawab secara teknis dan administratif; (iv) hasil kegiatan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat; (v) hasil kegiatan harus dilanjutkan dan

MINISTRATE

dikembangkan oleh masyarakat dalam kerangka organisasi masyarakat setempat; dan (vi) program dapat dilaksanakan secara komprehensif pada seluruh bidang yang memerlukan perhatian khusus.

Jaring pengaman sosial merupakan turunan dari program pemerintah pusat dalam rangka penanganan dampak covid kemarin di 2020, di APBD juga di alokasikan kegiatan-kegiatan untuk jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial terjemahan dari bentuk-bentuk perlindungan masyarakat. Program saat ini merupakan penanganan dampak inflasi, harga barang yang tidak stabil yang berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah, akhirnya pemerintah menurunkan suatu program kegiatan melalui Dana Insentif Daerah (DID), tujuannya adalah untuk mendorong daya beli masyarakat. Ada 4 belanja wajib, 1. Subsidi dalam bentuk perlindungan sosial; 2. Subsidi transportasi; 3. Pengembangan-pengembangan sarana usaha; 4. Bantuan sosial. Nah bantuan sosial untuk Kota Ternate kita arahkan ke bantuan kebutuhan dasar berupa bantuan rekening listrik. Pembayaran dan pelunasan rekening listrik, sehingga masyarakat-masyarakat tertentu listriknya di gratiskan. tujuannya untuk mendorong daya beli masyarakat, kebutuhan-kebutuhan dasar harus di penuhi. Itulah bentuk-bentuk perlindungan dari negara seperti yang pemerintah Daerah Kota Ternate berikan melalui belanja wajib bantuan sosial dari Jaring Pengaman Sosial dengan subsidi listrik 450 VA yang tersebar di kecamatan yang ada di Kota Ternate seperti yang sajian dalam tabel dibawah ini.



Gambar 1 Jumlah Penerima Jaring Pengaman Sosial 8 Kecamatan di Kota Ternate
Sumber: Dinas Sosial Kota Ternate (2023)

Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat data penerima manfaat dari program jaring pengaman sosial melalui subsidi listrik 450 VA untuk 8 kecamatan di Kota Ternate. Dapat dilihat dari nominal penerima manfaat untuk 8 kecamatan yang ada di Kota Ternate berfariasi seperti di Kecamatan Ternate Selatan terdapat 655 keluarga yang tersebar di 17 kelurahan, Kecamatan Ternate Tengah terdapat 574 keluarga yang tersebar di 16 kelurahan, Kecamatan Ternate Utara terdapat 808 keluarga yang tersebar di 14 kelurahan, Kecamatan Ternate Barat terdapat 589 keluarga yang tersebar di 7 kelurahan, Kecamatan Pulau Ternate terdapat 409 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan, Kecamatan Pulau Hiri terdapat 390 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan, dan Kecamatan Pulau Moti terdapat 588 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan. Sedangkan untuk kecamatan Pulau Batang Dua ada 6 kelurahan namun tidak ada penerima karena di kecamatan tersebut semua pelanggan PLN memakai daya listrik 900 VA dan diatasnya. Total keseluruhan ada 4013 keluarga penerima manfaat yang terdapat di 7 kecamatan yang ada untuk Kota Ternate.

MINISTRATE

Bila dilihat dari pengertiannya, bantuan sosial bisa dikatakan sebagai salah satu tipe belanja pemerintah yang tercantum dalam klasifikasi ekonomi. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran berbentuk transfer uang, barang ataupun jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada warga guna melindungi warga dari terjadinya resiko sosial, meningkatkan keahlian ekonomi serta/ ataupun kesejahteraan warga. Penafsiran resiko sosial sendiri merupakan peristiwa ataupun kejadian yang bisa memunculkan potensi terbentuknya kerentanan sosial yang ditanggung oleh orang, keluarga, kelompok, serta/ atau warga akibat krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, wabah penyakit serta musibah alam yang bila tidak diberikan belanja bantuan sosial hendak terus menjadi terpuruk serta tidak bisa hidup dalam keadaan normal (Dharmakarja, 2017).

Sebagaimana dijelaskan di atas, krisis ekonomi, sosial, dan kepercayaan yang dialami Indonesia saat ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan. Untuk mencoba memecahkan masalah ini, perlu dilakukan identifikasi sejumlah faktor, termasuk faktor-faktor yang ada sebelum krisis dan faktor-faktor yang muncul setelah krisis; masalah pengangguran dan kemiskinan; permasalahan yang timbul di pedesaan dan perkotaan; serta program pembangunan yang dilaksanakan sebelum dan sesudah krisis. Dari pengamatan tersebut perlu dilakukan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah, khususnya untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan melalui upaya berkelanjutan. Pendekatan program JPS adalah pertumbuhan melalui pemerataan berkelanjutan yang disampaikan melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan masyarakat disertai dengan dukungan fasilitator. Penyediaan staf asisten melibatkan lembaga pembangunan non-pemerintah (LPSM/LSM) untuk mendorong dan memantau pengelolaan bantuan. Pengelolaan bantuan menerapkan prinsip pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dalam konteks kelompok usaha produktif kolektif, seperti pokmas (kelompok masyarakat), poksar (kelompok sasaran) dan kelompok lainnya.

Pelaksanaan program dilaunching pada Desember 2022 ketika hari jadi Ternate, program ini menggunakan postur anggaran 2022 dan akan jalan di tahun 2023. Ada masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu namun belum tersentuh oleh pemerintah pusat karena terbatasnya kuota yang di berikan oleh pusat, karena ada anggaran dari daerah untuk bantuan sosial untuk keluarga yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Penerima manfaat setiap tahun berubah, bisa saja ada penambahan, dan bisa juga ada pengurangan. Karena status sosial keluarga tidak mungkin stagnan terus, pasti ada perubahan. Kemudian tergantung juga dengan ketersediaan anggaran, kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk bantuan sosial seperti bagaimana nanti di kalkulasikan. Pengelolaan anggaran bantuan sosial ini melalui satu pintu yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tapi teknisnya dari Dinas Sosial karena data adanya di Dinas Sosial. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan postur anggaran penanganan dampak inflasi dimaksimalkan sehingga pemerintah daerah diwajibkan menyisihkan anggaran untuk penanganan masalah sosial maka.

Anggaran belanja wajib ada 4 komponen yaitu 1. itu subsidi dalam bentuk perlindungan sosial; 2. Subsidi transportasi; 3. Pengembangan-pengembangan sarana usaha; 4. Bantuan sosial. Melalui kebijakan Pak Walikota Ternate, salah satunya penangan dampak inflasi melalui pembayaran listrik bagi masyarakat yang menggunakan daya listrik 450 VA agar masyarakat menengah kebawah sudah tidak lagi berpikir untuk membayar listrik setiap bulan. Penerima manfaat ini sudah masuk kategori listrik gratis karena sudah ada subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah menambahkan dengan program dampak inflasi jadinya listrik keluarga penerima manfaat masuk kategori gratis dari pemerintah. Alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk program ini yaitu 1 M, distribusi sesuai jumlah pelanggan 450 VA dari PLN, untuk masing-masing keluarga mendapatkan 240 ribu rupiah diluar biaya administrasi. Jadi setiap pembelian token atau pembayaran listrik pasti ada biaya administrasinya. Untuk biaya

MINISTRATE

administrasi saat ini yang tersedia ada 996 juta. Pemerintah daerah Kota Ternate ingatkan kepada pihak kelurahan untuk disampaikan ke keluarga penerima manfaat jangan karena listrik sudah gratis kemudian buat pengajuan untuk menaikkan daya listrik jadi 900 VA, ada konsekuensi kalau naikan daya listrik maka bantuannya hilang atau di alihkan ke mereka yang menggunakan daya 450 VA.

Dalam 450 VA ada 2 kategori, ada prabayar dan ada pasca bayar. Kalau yang prabayar berarti pemerintah Kota Ternate hanya memberikan token. Untuk mekanismenya, uang dari pemerintah daerah Kota Ternate akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Pemerintah daerah kerjasama dengan PT. POS Cabang Ternate, setelah terima uang, PT. Pos Cabang Ternate akan membelanjakan, jadi masyarakat tidak menerima dalam bentuk uang namun dalam bentuk token. Kemudian yang pasca bayar harus menunggu ada tagihan PLN untuk PT. Pos Cabang Ternate bayar dan bukti bayar di serahkan ke keluarga penerima manfaat. Mereka gunakan sampai 240 ribu habis, kebutuhan pemakaian setiap keluarga berbeda jadi tinggal mereka manfaatkan sesuai kebutuhan. Ada yang pemakaian besar hanya bisa pakai bantuannya 3 sampai dengan 3 bulan, namun kalau yang pemakaiannya rendah mereka bisa gunakan bantuan bisa sampai 11 dan 12 bulan bahkan ada yang bisa sampai 1 tahun 6 bulan. Untuk masyarakat yang belum memiliki akses listrik maka ada program pemerintah pusat yaitu lisdes, mereka di sentuh melalui program pasang gratis daya listrik 450 VA. Tidak semua masyarakat menerima manfaat dari program jaring pengaman sosial melalui subsidi listrik 450 VA untuk 8 kecamatan di Kota Ternate.

Simpulan

Pemerintah daerah Kota Ternate menyasar pengguna daya listrik 450 VA untuk mendapatkan subsidi pembayaran listrik karena bisa di pastikan masyarakat yang menggunakan listrik 450 V merupakan masyarakat dengan keadaan ekonomi dibawah rata-rata atau masuk kategori miskin. Pemerintah daerah menyasar mereka yang menggunakan 450 VA karena mereka sudah pasti masyarakat menengah kebawah, hal ini bisa lihat dari pembayaran yuran perbulan hanya 10 ribu. Untuk 8 Kecamatan di Kota Ternate sendiri ada 4013 yang masih menggunakan 450 VA tersebar di 78 kelurahan. Mereka yang menggunakan listrik 450 VA kalau di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data masyarakat dengan pendapatan dibawah 40% itu merupakan masyarakat yang terdata kategori desil 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan pembagian katogori tingkat kemiskinan. Penentuan desil dan tingkat kesejahteraan juga merupakan salah satu indikator yang di pakai pemerintah daerah Kota Ternate untuk melihat tingkat kesejahteraan, kalau orang yang tingkat kesejahteraan masih rendah tidak mungkin pakai daya listrik 1300 VA keatas. Listrik juga menjadi acuan penilaian tingkat kemiskinan, kebutuhan dasar masyarakat di berikan mulai dari bantuan sosial sembako kemudian pemerintah daerah lebarkan ke subsidi listrik untuk membantu masyarakat dengan tujuan dapat mendorong daya beli masyarakat.

Referensi

- Abimanyu, A. (1998). *Minyak Bumi dan Bantuan Luar Negeri: Dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Aldama, Y., Afifuddin, A., & Sekarsari, R. W. (2021). Upaya Pemerintah dalam Program Jaring Pengaman Sosial untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Evaluasi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan). *Respon Publik*, 15(10), 65-73.

- Ardi, F. A., & Almaida, Z. (2022). Implementasi Program Taman Olah Jelantah dalam Memperkuat Jaringan Pengaman Sosial Desa Kalitengah. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(4), 222-231.
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran. *Centre for Strategic and International Studies*, 1-11.
- Basri, Y. M., Prasetyo, Y., & Susilatri, S. (2022). Pengelolaan Belanja Dampak Jaringan Pengaman Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 104-113.
- Dharmakarja, G. I. (2017). Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. *Jurnal Substansi, Politeknik Keuangan Negara STAN*, 375
- Elizabeth, R. (2021). Peningkatan Peran Kohesi dan Solidaritas Sosial Petani Medukung Keberhasilan Penyaluran Jaringan Pengaman Sosial di Masa Pandemi COVID19. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 514-531.
- Elizabeth, R. (2022). Perubahan Sosial Ekonomi dan Pengentasan Petani Kecil Rentan Melalui Bantuan Jaringan Pengaman Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Journal of Scientech Research and Development*, 4(1), 001-015.
- Fanni, D. Y. N., Saiman, S., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Program Jaringan Pengaman Sosial dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kepada Masyarakat yang Terdampak COVID-19 (Studi Kasus di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 6(2), 523-530.
- Hajad, V., Ikhsan, I., & Marefanda, N. (2021). Jaringan Pengaman Sosial: Analisis Anggaran Penanganan COVID-19 di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 126-139.
- Lexy j, Moleong (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Kariaya, Bandung.
- Lisma, N., & Kurniawan, A. (2022). Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Penanggulangan COVID-19 di Bidang Jaringan Pengaman Sosial Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(1), 61-70.
- Mubyarto. (1998). *Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muthiah, N. (2021). Studi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi. *Policy Assessment, The Indonesian Institute-Center for Public Policy Research*.
- Nasrah, H., Irdayanti, I., Nesneri, Y., & Hidayati, F. (2021). Implementasi Program Jaringan Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 11(2), 119-138.
- Nurullah, P. O. D. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Bantuan Jaringan Pengaman Sosial Berbasis Web (Studi Kasus: Kantor Kecamatan Maospati, Magetan)* (Doctoral dissertation, University of Technology Yogyakarta).
- Putra, N. H., & Anzaikhan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Era Pandemi COVID-19. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 39-56.
- Setyawan, D., Rais, D. U., & Maroko, J. (2023). Program Jaringan Pengaman Sosial Pasca Pandemi di Kabupaten Malang. *REFORMASI*, 13(2), 186-194.

MINISTRATE

- Subbarao, K. (1997). *Safety Net Programs and Poverty Reduction: Lessons from Cross-Country Experience*. Washinton DC: The World Bank.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwandi, A. A., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Manajemen Pemerintahan dalam Program Jaring Pengaman Sosial pada Masa Pandemi COVID-19 di Dinas Sosial Kabupaten Karawang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(7), 2551-2560.
- Timmerman, M. I., Sambiran, S., & Pangemanan, S. (2021). Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga Harapan dalam Penanganan Covid-19 di Kelurahan Mahakeret Barat. *Governance*, 1(1).
- Wibawani, S., Hernanda, F., Kusuma, R. G., & Irawan, F. A. (2021). Evaluasi Program BLT Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. *Syntax*, 3(5).